



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2024**

Jl. Awang Long No.054 RT.05
Kode Pos 75564 e-mail : kec.kenohan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Periode Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kenohan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada SKPD.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Kenohan.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Kenohan dimasa yang akan datang.

Kenohan, 08 Agustus 2023
Camat Kenohan

H. Kaspul, SE., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680409 198903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang..... 1

Landasan Hukum..... 2

Maksud dan Tujuan..... 3

Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 11

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 23

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 44

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan..... 46

BAB V PENUTUP..... 54

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD SD Tahun 2023	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan	12
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	17
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara	24
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenohan dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kenohan yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kenohan. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapayang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktupenyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewakili dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marginal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Kenohan mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Kenohan, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

- 1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kenohan;
- 2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kenohan.

1.3.2 Tujuan

- 1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kenohan Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kenohan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KENOHAN TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun *tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Kenohan* adalah:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan - kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

- 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang} \times 100}{\text{Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

- 2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formula:

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

- 3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase Jumlah Kelompok Siskamling Aktif} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

- 4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi Anggaran Kecamatan Kenohan tahun lalu (2022) secara rinci dapat dilihat ada **Tabel 2.1 / Tabel T-C.29** dibawah ini:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Kecamatan Kenohan														
Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
7	01	02	Target Renja-PD tahun (2022)						Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
7		02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	86,36	86,36	86,36	100%	86,36	86,36	95%
7		02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	12	2	2	2	100%	2	6	50%
7		02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	1000	50	50	50	100%	50	150	150%
7		02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan	9	16	16	16	100%	24	48	53%
7		03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100							
7		03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali								

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	100	150	150	167%	150	450	45%
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	4	4	4	100%	4	4	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	75						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	9						
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	9	100%	9	27	300%
7	01	06	2.01	02	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	9	100%	9	27	300%
X	XX	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78						
X	XX	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
X	XX	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	50	10	10	100%	10	30	60%

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
								Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	XX	01.	2.01	02	Dokumen	50	10	10	10	100%	10	30	60%
	X	XX	01.	03		125	25	25	25	100%	25	75	60%
X	XX	01.	2.02										
X	XX	01.	2.02	01	Orang	24	24	24	24	100%	24	24	100%
X	XX	01.	2.02	02	Laporan	60	12	12	12	100%	12	12	46%
X	XX	01.	2.03										
X	XX	01.	2.03	01	Laporan	12	12	12	12	100%	12	12	200%
X	XX	01.	2.06										
X	XX	01.	2.06	01	Item	60	12	12	12	100%	12	36	200%
X	XX	01.	2.06	02	Jenis/kotak	200	200	200	200	100%	200	600	300%
X	XX	01.	2.06	03	Lembar	1000	1000	1000	1000	100%	1000	3000	300%

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023 TW.1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
X	XX	01.	2.06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	72	12	12	100%	12	36	50%
X	XX	01.	2.06	05	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	80	41,07	70	59%	70	51	64%
X	XX	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								
X	XX	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	100%	12	36	300%
X	XX	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara								
X	XX	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	24	4	4	100%	4	12	200%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kenohan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kenohan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat.
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan selama kurun waktu tahun 2021 – 2026, yakni ada 4 Indikator Kinerja Utama

1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa; dan
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan.

Lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan, dapat dilihat pada **tabel 2.2 / Tabel T-C.30** dibawah ini :

Tabel T-C.30
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan
 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
1	2	3	4	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	14	
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Realisasi capaian tahun 2023 per Juni (Triwulan 2)
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Kenohan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kenohan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan:

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
- Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalitan data penduduk sulit di capai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga

2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

- a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik.
- b. Adanya SKPT ganda
- c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi penyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas- batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikannya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

Permasalahan :

- a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat dan lembaga - lembaga yang berada di tingkat Desa maupun kecamatan dengan stake holder

atau dinas terkait dan pihak swasta yang ada di wilayah Kecamatan Kenohan.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda
- e. karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat, Permasalahan:

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing

- lingkungan;
- c. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
 - d. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

- 1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
- 3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022

Review rancangan awal RKPD Kecamatan Kenohan adalah perbandingan antara program/kegiatan yang tertuang ke dalam rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan SKPD atau adanya perubahan program kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.

Review secara rinci dapat disampaikan sebagaimana dalam **Tabel 2.3** dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kenohan

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD												
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kenohan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kenohan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	20.000.000
			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	2.455.000.000	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		Persen	86,36	2.455.000.000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2.475.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2.475.000.000
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	9	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenohan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	9	20.000.000
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenohan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan	12	2.455.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenohan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan	12	2.455.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kec. Kenohan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Persen	100	230.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kec. Kenohan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Persen	100	230.000.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DESA DAN KELURAHAN		Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif				DESA DAN KELURAHAN		Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif			
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	2	230.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	230.000.000
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	150	30.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	150	30.000.000
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	3	200.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenohan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Kegiatan	3	200.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kenohan	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	35.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kenohan	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	35.000.000
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	9	35.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kenohan	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	9	35.000.000

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD												
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.1	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kenohan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	17.500.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kec. Kenohan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	17.500.000
3.1.2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kenohan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	17.500.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kenohan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	17.500.000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kenohan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (75)	4.335.208.211	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kenohan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (75)	4.335.208.211
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	55.156.243	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	55.156.243
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.000.000
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Laporan	12	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Laporan	12	20.000.000
4.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.156.243	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.156.243

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD												
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	37	3.217.976.394	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	37	3.217.976.394
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	24	3.135.464.394	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	24	3.135.464.394
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	82.512.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	82.512.000
6.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	12	34.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	12	34.200.000
6.1.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	12	34.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	12	34.200.000
7.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	5	259.280.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	5	259.280.000
7.1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Item	12	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Item	12	35.000.000
7.1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kotak	200	5.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kotak	200	5.000.000

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD												
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	7600	2.280.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	7600	2.280.000
7.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	12	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	12	200.000.000
7.1.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Dokumen	2	17.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kenohan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Dokumen	2	17.000.000
8.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	501.857.294	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	501.857.294
8.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kenohan	Jumlah surat menyurat	Bulan	12	2.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kenohan	Jumlah surat menyurat	Bulan	12	2.900.000
8.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenohan	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	105.000.000
8.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	5.000.000

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD												
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	388.957.294	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenohan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	388.957.294
9.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	18	266.738.280	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kenohan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	18	266.738.280
9.1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	18	266.738.280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kenohan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	18	266.738.280
			Jumlah			7.075.208.211			Jumlah			7.075.208.211

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat tentang program pembangunan terakomodir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan setiap satu tahunsekali. Dari dokumen perencanaan yang ada, sebagian besar usulan masyarakat lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik. Hal ini dapat dimengerti karena memang masyarakat sangat mendambakan sarana pelayanan umum yang layak, misalnya jalan , jembatan , gedung sekolah dan tempat ibadah. Usulan program dan kegiatan wilayah Kecamatan Kenohan yang utamanya mengedepankan bidang infrastruktur dan umumnya dalam bidang pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tidaklah semata - mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan atau diprogramkan. Alasan yang paling lazim untuk pernyataan tersebut adalah keterbatasan dana dan sumberdaya pendukung lainnya. Oleh karena itu perlu dalam satu perencanaan memilah kegiatan mana yang mendesak dan segera dibutuhkan masyarakat dan kegiatan mana yang dapat ditunda. Dengan kata lain dalam setiap perencanaan pembangunan perlu menyusun prioritas program kegiatan.

Prioritas program pembangunan Kecamatan Kenohan Tahun 2022 mengacu pada arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara umum sebagaiberikut :

- a. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan/Mikro.
- c. Peningkatan Fungsi Kecamatan bidang pembangunan skala kecil sesuai permasalahan Kecamatan.

Namun demikian kegiatan lain yang bersifat non fisik masih mendapat apresiasi dari masyarakat, misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, walaupun volumenya kecil. Selanjutnya, untuk lebih detail tentang usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk usulan tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.4** dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sub Tema	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi (Desa/Kel)	Paket pekerjaan yang diusulkan	Volume	Pagu Indikatif	Data Spasial (Titik Koordinat, line, polygon)	Sumber Pembiayaan (APBD, APBD Provinsi, APBN dan CSR)	Link upload dokumen pendukung (Gdrive)	Disepakati / Tidak Disepakati	Perangkat Daerah Pelaksana/pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1			Sangat Diperlukan oleh Masyarakat	Desa Teluk Muda RT.05-RT.06	Lanjutan Pembangunan Jembatan Titian Ulin	4 x 100 m	Rp200,000,000		APBD			DINAS PU
2			Belum adanya Perilaku Umum memudahkan akses masyarakat	Desa Teluk Muda	Pengadaan Perilaku Umum Penyebrangan	3 x 15 m	Rp200,000,000		APBD			DINAS PERHUBUNGAN
3			Belum adanya lampu penerangan jalan umum	Desa Teluk Muda	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	30 Unit	Rp300,000,000		APBD			DINAS PERHUBUNGAN
4			Terdapat blank spot yang menyebabkan terkendala pelayanan	Desa Teluk Muda	Pembangunan Tower Telekomunikasi	1 tower	Rp1,000,000,000		APBN			DISKOMINFO
5			Kondisi lantai Jembatan yang sudah rusak	Desa Teluk Muda	Lanjutan Semenisasi Jalan Jembatan Ulin RT.06	4 x 100 m	Rp200,000,000		APBD			DINAS PU
6			Kondisi jalan saat ini masih rendah, apabila datang musim banjir selalu tergenang air	Desa Teluk Muda	Peningkatan Badan Jalan Pelabuhan Perilaku	11 x 107 m	Rp300,000,000		APBD			DINAS PU
7			Kondisi Dermaga yang sudah tidak layak	Desa Teluk Muda	Pengadaan Dermaga Ponton	4 x 12 m	Rp1,000,000,000		APBD			DINAS PERHUBUNGAN
8			Selain usia Bangunan sudah sangat tua dan kondisi kantor yang sudah tidak layak	Desa Teluk Muda	Pembangunan Kantor Desa	13 x 16 m	Rp500,000,000		APBD			DINAS PU
9			Belum adanya mesin ces dan perahu untuk nelayan	Desa Teluk Muda	Pengadaan Ces/Ketinting dan	200 Unit	Rp1,000,000,000		APBD			DINAS PERIKANAN

2					Desa Lamin Telihan RT. 02	Jembatan Titian Ulin	4 x 155 m			APBD			DINAS PU
3					Desa Lamin Telihan	Perbaikan Lapangan sepak bola	1 Paket			APBD			DISPORA
4					Desa Lamin Telihan	Pengadaan Sarana Olah Raga Volly Ball	1 Paket			APBD			DISPORA
5					Desa Lamin Telihan	Pengadaan Alat Intalasi Air Bersih	1 Paket			APBD			PERKIM
6					Desa Lamin Telihan	Pengadaan Tandon Air 1.200 Liter	70 Unit			APBD			PERKIM
7					Dusun Malong Desa Lamin Telihan	Penyelesaian Gedung Gereja GPDI	8 x 12 m			APBD			KESRA
8					Dusun Malong Desa Lamin Telihan	Pembangunan Gedung TK	8 x 8 m			APBD			DISDIK
9					Desa Lamin Telihan	Pagar Halaman Sekolah SDN 006	1 Paket			APBD			DISDIK
10					Desa Lamin Telihan	Semenisasi Halaman Sekolah	1 Paket			APBD			DISDIK
11					Desa Lamin Telihan	Pembangunan Teras Gedung TK Gloria	6 x 12 m			APBD			DISDIK
12				Belum adanya Perkebunan milik Desa	Desa Lamin Telihan	Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	10 Ha	Rp200,000, 000		APBD Provinsi			DISBUN
13				Belum adanya Bibit Kelapa Sawit	Desa Lamin Telihan	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam	1.500 Pohon	Rp75,000,0 00		APBD Provinsi			DISBUN
14					Desa Lamin Telihan	Pembangunan Rumah Lamin Adat	1 Paket	Rp300,000, 000		APBD Provinsi			PERKIM
15					Desa Lamin Telihan	Semenisasi Jalan Desa	5 x 3000 m						DINAS PU
16					Desa Lamin Telihan	Jembatan Titian Ulin	4 x 155 m						DINAS PU
17					Desa Lamin Telihan	Jembatan Beton RT. 07	6 x 30 m						DINAS PU
18				Untuk memudahkan Pelayanan kepada Masyarakat	Desa Lamin Telihan	Pembangunan Kantor Desa Terpadu	1 Paket	Rp1,000,00 0,000					DINAS PU

19			Untuk mempermudah Jaringan Komunikasi antar Masyarakat	Dusun Malong Desa Lamin Telihan	Pembangunan Tower Telkomsel	1 Paket					DISKOMINFO
			Kurangnya Bibit Ayam	Desa Lamin Telihan	Pengadaan Bibit Ayam Daging	5000 Ekor	Rp12,500,000		CSR		DISTANAK
				Desa Lamin Telihan	Pengadaan Bibit Babi	100 Ekor	Rp50,000,000		CSR		DISTANAK
1			Pembangunan jalan tersebut sebagai pemecah masalah transportasi masyarakat dan para pengguna jalan dari segi ekonomi dan pendidikan merupakan faktor yang utama	Desa Kahala Ilir	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Menuju Akses Pendidikan, Kesehatan, Wisata, dan Jalan Produksi Kabupaten/Kecamatan (Jalan Desa Kahala Ilir Menuju Dusun Pendamaran)	9,5 Km x 9 Meter	Rp30,000,000		APBD		DINAS PU
2			Pembangunan MCK tersebut untuk memecahkan permasalahan lingkungan yang sehat dengan MCK disetiap rumah	Desa Kahala Ilir	Pembangunan MCK Umum/Komunal Kecamatan	2 m x 3m	Rp3,000,000		APBD		PERKIM
3			Pembangunan Rumah Ini untuk menjadikan tempat tinggal yang layak dan bisa mensahjaterakan masyarakatnya	Desa Kahala Ilir	Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	5 m x 6 m	Rp3,000,000		APBD		PERKIM
4			Sulitnya untuk melakukan perkebanganbiakan ikan dan untuk menjaga ketersediaan ikan maka perlunya penyediaan keramba untuk memelihara ikan	Desa Kahala Ilir	Penyediaan Unit Keramba	2 m x 3m	Rp300,000,000		APBD		DINAS PERIKANAN

5			Karena kurangnya alat tangkap ikan sehingga diperlukannya alat tangkap ini untuk menambah hasil tangkapan ikan	Desa Kahala Ilir	Pengadaan Bahan Pembuat Alat Tangkap Ikan (Kawat Tempirai)	Pcs	Rp300,000,000		APBD			DINAS PERIKANAN
6			Karena mahal nya harga perahu dan mesin ces sehingga menyulitkan nelayan untuk mencari tempat untuk tangkap ikan yang agak jauh agar menambah hasil tangkapan	Desa Kahala Ilir	Penyedia Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan (O-5GT)	Paket	Rp750,000,000		APBD			DINAS PERIKANAN
7			Untuk memecahkan masalah kebutuhan peternakan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat	Desa Kahala Ilir	Pengadaan Bibit Sapi	Ekor	Rp750,000,000		APBD			DISTANAK
8			Untuk memecahkan masalah kebutuhan peternakan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat	Desa Kahala Ilir	Pengadaan Bibit Kambing	Ekor	Rp450,000,000		APBD			DISTANAK
9			Dikarenakan bangunan yang sudah tidak layak dipergunakan sebagai kantor pemerintahan	Desa Kahala Ilir	Pembangunan Kantor Desa dan Pembangunan Ruang Pertemuan Desa	16 m x 9 m dan 4 m x 6 m	Rp5,000,000,000		APBD			DINAS PU
10				Desa Kahala Ilir	Drainase Pertanian	300 m x 1 m x 0,80 m	Rp800,000,000		APBD			DINAS PU
11			Dikarenakan belum adanya akses yang menandakan tempat wisata dan untuk tambahan perahu untuk menuju lokasi wisata tersebut	Desa Kahala Ilir	Pembangunan Pelabuhan Wisata Solong Pinang Abang dan Pembangunan Pagar Lokasi Wisata	10 m x 20 m	Rp2,000,000,000		APBD			DISHUB
1			Terpenuhinya Sarana Olah Raga	Desa Semayang	Semenisasi Lapangan Olah Raga	30 x 40 m	Rp300,000,000		APBD			DISPORA
2			Terpenuhinya sarana dan prasarana Jembatan Desa	Desa Semayang	Peningkatan/ Pelebaran Jalan Jembatan	2 x 600 m	Rp200,000,000		APBD			DINAS PU
3			Terpenuhinya sarana dan prasarana Jembatan Desa	Desa Semayang	Semenisasi Jalan Jembatan	4 x 600 m	Rp200,000,000		APBD			DINAS PU

4			Terpenuhinya sarana dan prasarana Jembatan Desa	Desa Semayang	Rehab Penambahan Gelegar Jembatan RT. 01 - RT.12	4 x 3000 m	Rp300,000,000	APBD			DINAS PU
5				Desa Semayang	Rehab Berat Pusban	15 x 20 m	Rp1,000,000,000	APBD			DINKES
6			Mensejahterakan para nelayan	Desa Semayang	Bantuan Pengadaan Perahu Piber Nelayan	7 m	Rp300,000,000	APBD			DINAS PERIKANAN
7			Mensejahterakan para nelayan	Desa Semayang	Bantuan Pengadaan Mesin Ces Nelayan	6 HP	Rp200,000,000	APBD			DINAS PERIKANAN
8			Meningkatkan Infrastruktur Desa	Desa Semayang	Pembangunan Jalan Semayang 2	6 x 2000 m	Rp10,000,000,000	APBD			DINAS PU
9			Terpenuhinya Sarana Olah Raga	Desa Semayang	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	70 x 110 m	Rp1,000,000,000	APBD Provinsi			DISPORA
10			Meningkatkan sarana Infrastruktur Desa Semayang dan Kecamatan	Desa Semayang	Peningkatan Jalan Semayang Menuju Jalan Poros	6 x 5000 m	Rp15,000,000,000	APBD Provinsi			DINAS PU
11			Terpenuhinya Pembangunan Menara Mesjid	Desa Semayang	Pembangunan Menara Mesjid AL HIKMAH DARUSSALAM	1 Paket	Rp1,000,000,000	APBD Provinsi			KESRA
12			Terpenuhinya Rumah Ibadah Yang Nyaman	Desa Semayang RT. 06	Rehab Mesjid NURUL YAQIN	1 Paket	Rp150,000,000	APBD Provinsi			KESRA
13			Terpenuhinya penambahan Ruangan Pendidikan	Desa Semayang RT. 06	Rehab Penambahan Sekolah SD 009	1 Paket	Rp100,000,000	APBD Provinsi			DISDIK
14			Membantu Para Guru Yang Diluar Desa	Desa Semayang	Rehab Rumah Guru SDN 009	1 Paket	Rp120,000,000	APBD Provinsi			DISDIK
15			Membantu Para Guru Yang Diluar Desa	Desa Semayang	Rehab Rumah Guru SDN 03	1 Paket	Rp120,000,000	APBD Provinsi			DISDIK
16				Desa Semayang	Penyambungan Saluran Tiang Listrik	5 Km	Rp1,000,000,000	APBD Provinsi			DISHUB

17																			DINAS PU
18																			DINAS PU
19																			DINAS PU
20																			DINAS PU
21																			DINAS PU
22																			DINAS PU
23																			DINAS PU
24																			DINAS PU
1																			PERKIM
2																			PERINDAGKO P

3								Belum ada Terbangunnya Pasar desa di Desa Teluk Bingkai. Semoga Terbangunnya Pasar desa Bisa Mendongkrak perekonomian masyarakat. karena desa teluk bingkai terletak sangat Strategis.	DESA TELUK BINGKAI RT 009 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan pasar desa dan kecamatan					APBD		PERINDAGKO P
4								Kareana Desa Teluk Bingkai Mempunyai 3 Posyandu Yaitu Posyandu hidup baru 1 Sudah Tebangun gedung Posyandu, posyandu hidup baru 2 Sudah Terbangun juga dan Posyandu hidup baru 3 Belum terbangun sama sekali, Masih Penimbangannya di rumah Pribadi Kader Posyandu.	Desa Teluk Bingkai RT 007 Kecamatan Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Posyandu Kecamatan Kenohan					APBD		DINKES
5								Tidak ada Terbangunnya Gorong-Gorong Desa Terdapat 4 Titik Yang Harus di Bangun Karena Sering Terjadinya Genangan Air Dihalaman Rumah Warga. Karena Pembungannya Tidak Efektif.	DESA TELUK BINGKAI RT 002 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan Kenohan					APBD		DINAS PU
6								Belum Adanya Yang Ahli. Masyarakat Sering Servis Keluar Desa.	DESA TELUK BINGKAI RT 006 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pembekalan Bengkel Motor					APBD		DISNAKER
7								Ada Salah Satu Masyarakat Bisa Tenun.	DESA TELUK BINGKAI RT 006 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,	Pembekalan Ecoprint dan Tenun					APBD		DISNAKER

14					Sampah di Desa Teluk Bingkai Tidak Cukup Mobil pick up. Karena Itu Kami Berharap Desa Teluk Bingkai Bisa diadakan Mobil Alat angkut sampah (Dump Truck)	DESA TELUK BINGKAI KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Kendaraan Alat Angkut Sampah (Dump Truck)				APBD				DLHK
15					Belum Terlalu Memadai Perlengkapan Paud.	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Perlengkapan PAUD (perlengkapan sekolah, seperti : Lemari, Rak Sepatu, Rak Tas, Papan Tulis, dll)				APBD				DISDIK
16					Belum Terlalu Memadai Perlengkapan Siswa Paud	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Tas, Buku, Baju, Pensil Warna, Buku Gambar, dll)				APBD				DISDIK
17					Atas Inisiatif, usulan, masukan dari berbagai pihak yang sudah melalui tahap musyawarah anggota dan masuk ke musrenbangdes Desa Teluk Bingkai serta melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, maka dengan ini kami mengusulkan kegiatan ini	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan, Pembangunan dan Perbaikan Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat				APBD				DISPORA
18					Peningkatan Aparatur sangat Penting Karena Sitiap Tahun Banyak Aplikasi yg Berubah-ubah Versinya seperti Bimtek siskeudes, Sipades, Pengukuran dan Pemetaan Tanah dll	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA1,	Pelatihan/Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa				APBD				DPMD

24				Untuk Pengawasan Orang yg Nyetum di Sepanjang Sungai. Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan Sarana Pengawasan (Perahu+Mesin Ces+Senter, Life Jacket, GPS) Bagi POKMASWAS				APBD				DINAS PERIKANAN
25				Penambahan Unit Keramba masyarakat.	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan Unit Keramba					APBD			DINAS PERIKANAN
26				Rehap Berat Rumah Ibadah	Desa Teluk Bingkai RT 004 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Rehab Berat/Sedang/Ringan Rumah Ibadah					APBD			KESRA
27				Normalisasi Sungai Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Normalisasi Sungai					APBD Provinsi			DINAS PU
28				Perlunya Peningkatan Kapasitas Kaur Kasi kepala desa dan Sekdes.	Desa Teluk Bingkai RT 001 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan/Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa					APBD Provinsi			DPMD
29				Perlunya ada Pelatihan/Bimtek BPD.	Desa Teluk Bingkai RT 001 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pelatihan/Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD)					APBD Provinsi			DPMD

30				Memudahkan Masyarakat Untuk Mengeluarkan Hasil Perkebunannya	Desa Teluk Bingkai RT 009 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha perkebunan				APBD Provinsi				DISBUN
31				DiDesa Teluk Bingkai Sangat Potensial untuk Budidaya Ikan Air Tawar	Desa Teluk Bingkai RT 009 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan Tambak Budidaya Ikan Air Tawar				APBD Provinsi				DINAS PERIKANAN
32				Desa Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai RT 001 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pengadaan Sapi				APBD Provinsi				DISTANAK
33				Di Desa Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan kapasitas sumber daya pemberdayaan perempuan				APBD Provinsi				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
34				Perlu adanya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Khususnya di SD 008 Kenohan	Desa Teluk Bingkai RT 003 Kec. kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik				APBD Provinsi				DISDIK
35				Perlu adanya Peningkatan Layanan Pencegahan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Di Masyarakat Khususnya di Desa Teluk Bingkai	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan Layanan Pencegahan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan				APBD Provinsi				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

36				Perlu Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan sarana dan prasarana Persampahan	APBD Provinsi				DLHK
37				Minimnya alat Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa.	Desa Teluk Bingkai RT 004 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	APBD Provinsi				DINKES
38				-	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Saponin, Waring, Pupuk, Mesin Pakan dan Cool Box)	APBD Provinsi				DINAS PERIKANAN
39				-	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum Lainnya (Tandon, Talang Air Pengumpul, Truk Tangki, Hidran Umum, dsb)	APBD Provinsi				PERKIM
40				Sangat potensi didesa teluk bingkai karena danau monggoh sangat indah dan bisa jadi pusat wisata, adapun kawasan ranas banyak tanaman angger dll.	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	APBD Provinsi				DINAS PARIWISATA
41				Olahraga Masyarakat sehari-hari VOLLY, sepak bola, Bulutangkis dan Pancak Silat. Semoga Bisa Memberi sarana dan Prasarana Olahraga.	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	APBD Provinsi				DISPORA

42				-	Desa Teluk Bingkai Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				APBD Provinsi		PERKIM
43				-	rehabilitasi instalasi listrik bagi , Kab. Kutai Kartanegara	Rehabilitasi Instalasi Listrik bagi masyarakat kurang mampu				APBD Provinsi		PERKIM
44				Ada 2 RT Di Teluk Bingkai yg agak jauh dari Pemukiman pertama RT 7 21 Rumah dan 24 kk jiwa 75 orang.	Desa Teluk Bingkai RT 007 Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara	Pembangunan PLTS Komunal				APBD Provinsi		
1				Sangat Diperlukan oleh Masyarakat	Desa Tubuhan	Lanjutan semenisasi jalan desa	5 x 400 m			APBD Provinsi		DINAS PU
2					Desa Tubuhan RT.05,06,07	Lanjutan semenisasi jalan jembatan titian	4 x 800 m			APBD		DINAS PU
3					Desa Tubuhan RT.04	Semenisasi jalan simpang	100 m			APBD		DINAS PU
4					Desa Tubuhan RT.01	Pelebaran jalan simpang darat	300 m			APBD		DINAS PU
5					Desa Tubuhan	Pemancangan tiang listrik PLN				APBD		DISHUB
1				Kurang layaknya Jalan Pertanian Bagi warga	Ds. Kahala RT.001 (Ombong)	Peningkatan Jalan Desa	P: 6000 L: 6 T:0.2 meter	Rp2,000,000,000		APBD		DINAS PU
2				Kurang layaknya bangunan Kantor Desa Kahala	Ds. Kahala RT.08	Pembangunan Kantor Desa Kahala	P: 20 L: 10 m T: 15 m	Rp3,000,000,000		APBD		DINAS PU
3				Jalan yang kurang layak	RT005	Semenisasi Gang Akhmad	L: 2m P: 126m T:20cm	Rp200,000,000		APBD		DINAS PU
4				Jalan yang kurang layak	RT.006	Semenisasi Gang H. Arpikah	L: 2m P: 131m T:20cm	Rp200,000,000		APBD		DINAS PU

5			Jalan yang kurang layak	RT.001	Semenisasi Gang Hasan Saumah	L: 4m P: 191m T: 20cm	Rp200,000,000	APBD			DINAS PU
6			Semenisasi Jalan yang rusak dan kurang lebar	Desa Kahala RT.01	Semenisasi jalan Desa Kahala Menuju Desa Tuana Tuha	P: 600 L: 5 T: 0.2 meter	Rp200,000,000	APBD			DINAS PU
7			Jalan yang kurang layak	Desa Kahala RT.06	Pelebaran Jalan Baru SMPN 1 Kenohan	P: 200 L: 3 meter	Rp200,000,000	APBD			DINAS PU
8			Lingkungan yang kotor	Desa Kahala RT.001	Parit Beton SDN.011	Tebal: 0.1 L: 1 Tggi 1 P: 100 meter	Rp200,000,000	APBD			DINAS PU
9			Daerah aliran sungai kahala yang kurang terpelihara	Desa Kahala	Pembersihan Aliran Sungai Loa Surut	P = - + 10000 L = - + 75 meter	Rp200,000,000	APBD			DINAS PU
10			Tersediannya Dermaga	RT.008	Pembangunan Dermaga wisata	1 Paket	Rp1,000,000,000	APBD			DISHUB KESRA
11			Kondisi bangunan dan tanah yang kurang layak	Desa Kahala RT.008	Pembangunan Masjid Besar At-Taqwa	30 m x 25 m	Rp50,000,000,000	APBD Provinsi			
12			Kurang layaknya kondisi mas/asrama yang layak bagi pelajar/mahasiswa	Tenggarong	Pembangunan Mas/asrama Pelajar di Tenggarong	P: 20 m x L: 12m	Rp200,000,000	APBD Provinsi			DINAS PU
13			Belum adanya akses jalan & jembatan yang baik untuk waktu tempuh yang cepat	Ds. Kahala RT.001	Pembangunan Jembatan Ombong (Lintas Kecamatan & Kabupaten)	200 m x 8 m	Rp100,000,000,000	APBD Provinsi			DINAS PU
14			Kurangnya lahan yang baik untuk petani	Ds. Kahala RT.01	Percetakan Sawah Ds. Kahala	150 ha	Rp2,000,000,000	APBD Provinsi			DISTANAK
15			Kurangnya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat	Kahala RT.009	Instalasi Air Bersih	1000 m	Rp500,000,000	APBD Provinsi			PERKIM

16			Kurangnya tempat persediaan air bersih untuk warga	Desa Kahala	Pengadaan Tandon	100 Rumah Warga masyarakat	Rp150,000,000	APBD Provinsi			PERKIM
17			Kurangnya perlengkapan peralatan bagi kelompok Nelayan Kahala	Kelompok Dusun Permai	Pengadaan Ces/ketinting dan perahu para nelayan MZ.6.5 HP	50 unit	Rp750,000,000	APBD Provinsi			DINAS PERIKANAN
18			Kurang terpelihara jalan utama masuk kecamatan Kenohan	Desa Kahala RT.001, Jln. Kelapa Indah & Tuana Tuha	Pemeliharaan Jalan Inpres Desa Kahala	P: 5000 m L: 6 m	Rp200,000,000	CSR			DINAS PU
19			Kurang terpelihara jalan utama & Jembatan Loa surut masuk kecamatan Kenohan	Lapangan Bola PORSEKA	Pengurukan Lapangan Bola	P: 100 m L: 100 m	Rp200,000,000	CSR			DISPORA
20			Kurang terpelihara jalan Kelompok Tani & Jalan Akses karyawan prusahaan yang tidak layak di lewati	Desa Kahala RT.001	Pemeliharaan Jalan Ombong	P: 5500 m L: 6 m	Rp200,000,000	CSR			DINAS PU
1				Desa Tuana Tuha	Pembuatan Jalan Baru RT001 - RT002	P = 1.200 M L = 6 M Tinggi 10/20 Cm		CSR			DINAS PU
2				Desa Tuana Tuha	Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Ibu Kota Kecamatan	P = 1.227 M L = 5 M Tinggi 20 Cm		Dinas Bina Marga			DINAS PU
3				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Pasar Desa	P = 20 M L = 20 M Tinggi 6 m		DISPERI NDAKOP			DISPERINDA GKOP
4				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Teras Beton Masjid Jami' Baiturrahim	P = 155 M L = 40 M Tinggi = 5,5 M		Dinas Bina Marga			DINAS PU

5				Desa Tuana Tuha	Pengadaan LPJU Desa	1 Paket				Dinas Bina Marga		DINAS PU
6				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Greenhouse KWT	1 Paket				Dinas Pertanian		DISTANAK
7				Desa Tuana Tuha	Pembangunan Bangunan (TPA, Rumah Pintar & Posyandu) Terpadu	1 Paket				Dinas Bina Marga		DINAS PU
8				Desa Tuana Tuha	Pembuatan Parit Beton Jalan Desa	1 Paket				Dinas Bina Marga		DINAS PU
9				Desa Tuana Tuha	Pembinaan Kelompok Usaha Gula Aren	1 Paket				DISBUN HUT		DISBUN
10				Desa Tuana Tuha	Pembinaan Kelompok Usaha Peternakan Desa (Bibt Kambing, Ayam, dan Bebek)	4 Paket				Dinas Peternak an		DISTANAK
11				Desa Tuana Tuha	Rehab SDN Dusun Pendamaran	1 Paket				Dinas Pendidik an		DISDIK

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun Anggaran 2023 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kenohan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut

- a) Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kenohan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Kenohan mempunyai tujuan yaitu *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”*, yang artinya Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah. Meningkatkan sarana infrastruktur sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam, meningkatkan kelancaran proses administrasi kependudukan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu *“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”*, yang artinya meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya Interkoneksi antar wilayah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kenohan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kenohan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; dan Pembinaan pelayanan umum.

Penetapan Program dan kegiatan disamping menyesuaikan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tingkat urgensinya tinggi terutama permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana adalah penanggulangan banjir, sampah dan perbaikan sarana gang, serta jembatan sedangkan bidang sosial budaya adalah perbaikan RKB dan Peningkatan Sarana Posyandu melalui kegiatan PKK di wilayah Kecamatan Kenohan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dan uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kenohan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kenohan merupakan implementasi dari upaya

pencapaian visi dan misi Bupati.

- **Pencapaian MDGs**

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kenohan diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- **Pemberantasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kenohan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemberantasan kemiskinan pun menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja didalam perjanjian kinerja antara Camat kepada Bupati, dimana terdapat 2(dua)

indikator yaitu yang pertama membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Yang kedua melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Kenohan.

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kenohan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Kenohan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi itu terutama terkait dengan bidang perkebunan kelapa sawit, dimana di Kecamatan Kenohan terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang cukup besar dan juga kebun kelapa sawit rakyat yang ada diseluruh desa diwilayah Kecamatan Kenohan. Selain kelapa sawit ada juga sarang burung walet yang bisa dikatakan cukup banyak.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kenohan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kenohan Tahun 2023 adalah 4 Program dengan 9 Kegiatan yang terdiri dari 22 sub kegiatan.

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kenohan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kenohan dan melingkupi semua Desa.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Adapun secara detail akan kami sajikan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kenohan

Kode		Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana	Satuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kenohan	Persen	100	20.000.000	DBH		Persen	100	20.000.000	
					Persen	86,36	2.455.000.000	DBH		Persen	86,36	2.455.000.000	
7	01	02	2.04	Kec. Kenohan	Kegiatan	2	2.475.000.000	DBH		Kegiatan	2	2.475.000.000	
7	01	02		Kec. Kenohan	Berkas	9	20.000.000	DBH		Berkas	9	20.000.000	
7	01	02	03	Kec. Kenohan	Kegiatan	12	2.455.000.000	DBH		Kegiatan	12	2.455.000.000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kenohan	Pesentase	100	230.000.000	DBH		Pesentase	100	230.000.000	
7	01	03	2.01	Kec. Kenohan	Jenis	2	230.000.000	DBH		Jenis	2	230.000.000	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kenohan	Orang	150	30.000.000	DBH	Orang	150	30.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kenohan	Kegiatan	3	200.000.000	DBH	Kegiatan	3	200.000.000
7	01	06	2.01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Kec. Kenohan	Persen	45	35.000.000	DBH	Persen	45	35.000.000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Kec. Kenohan	Desa	9	35.000.000	DBH	Desa	9	35.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Kenohan	Desa	9	17.500.000	DBH	Desa	9	17.500.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Kenohan	Desa	9	17.500.000	DBH	Desa	9	17.500.000
7	01	01	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Poin	B (70)	4.324.288.688	DBH	Poin	B (70)	4.324.288.688
7	01	01	2.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Dokumen	16	55.156.243	DBH	Dokumen	16	55.156.243
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Dokumen	2	15.000.000	DBH	Dokumen	2	15.000.000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kenohan	Laporan	12	20.000.000	DBH	Laporan	12	20.000.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kenohan	Laporan	2	20.156.243	DBH	Laporan	2	20.156.243

7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kec. Kenohan	Laporan	12	3.217.976.394	DBH	Laporan	12	3.217.976.394
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenohan	Orang	24	3.135.464.394	DBH	Orang	24	3.135.464.394
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kec. Kenohan	Laporan	12	82.512.000	DBH	Laporan	12	82.512.000
7	01	01.	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Kec. Kenohan	Laporan	12	34.200.000	DBH	Laporan	12	34.200.000
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kenohan	Laporan	12	34.200.000	DBH	Laporan	12	34.200.000
7	01	01.	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kenohan	Jenis	5	209.280.000	DBH	Jenis	5	209.280.000
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Item	12	35.000.000	DBH	Item	12	35.000.000
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kenohan	Unit/Porsi	200	5.000.000	DBH	Unit/Porsi	200	5.000.000
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kenohan	Lembar	7600	2.280.000	DBH	Lembar	7600	2.280.000
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kenohan	Pelaksana	24	150.000.000	DBH	Pelaksana	24	150.000.000
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Kembang Janggut	Kegiatan	2	17.000.000	DBH	Kegiatan	2	17.000.000

7	01	01.	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kec. Kenohan	Bulan	12	501.857.294	DBH	Bulan	12	501.857.294
7	01	01.	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kec. Kenohan	Bulan	12	2.900.000	DBH	Bulan	12	2.900.000
7	01	01.	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kenohan	Bulan	12	105.000.000	DBH	Bulan	12	105.000.000
7	01	01.	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenohan	Bulan	12	5.000.000	DBH	Bulan	12	5.000.000
7	01	01.	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kenohan	Bulan	12	388.957.294	DBH	Bulan	12	388.957.294
7	01	01.	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Kenohan	Unit	18	266.738.280	DBH	Unit	18	266.738.280
7	01	01.	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kec. Kenohan	Unit	18	266.738.280	DBH	Unit	18	266.738.280
					Jumlah				7.075.208.211				7.075.208.211

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kenohan tahun 2021 – 2026 dan merupakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Periode Tahun 2023.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Tahun 2024 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan serta dengan Rencana Kerja Kecamatan Kenohan Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Untuk itu mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Demikian untuk dilaksanakan.

Kenohan, 08 Agustus 2023

Camat Kenohan



H. Kaspul, SE., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680409 198903 1 005